KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembangunan Gedung Baru: keamanan jadi dalih DPR
Tanggal : Senin, 21 Agustus 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

▶ PEMBANGUNAN GEDUNG BARU

Keamanan Jadi Dalih DPR

JAKARTA — Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI tetap ingin bagun gedung DPR MPR baru pada 2018 dengan alasan keamanan kendati banyak pihak tidak setuju lantaran menyebabkan pemborosan anggaran negara.

Kepala Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan Gedung Nusantara I awalnya dibangun dengan kapasitas daya tampung sekitar 800 orang. Akan tetapi, saat ini setiap harinya sekitar 5.000 orang bisa mendatangi gedung parlemen tersebut.

Menurutnya, berdasarkan hasil audit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gedung Nusantara I sudah mengalami keretakan dan diusulkan untuk dibenahi. Bahkan, pihaknya sejak tahun lalu telah menganjurkan anggota dewan tidak menyimpan barang yang berlebihan seperti lemari arsip yang berbobot sangat berat.

Sebelumnya beredar kabar bahwa di kompleks parlemen akan dibangun pula semacam apartemen agar tempat tinggal anggota dewan tidak terlalu jauh. Namun, hal itu dibantah Anton dan dia menegaskan DPR hanya membutuhkan gedung baru.

"Ini tidak mengada-ngada, itu kebutuhan," katanya akhir pekan lalu.

Untuk pembangunan gedung baru itu dia mengatakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp320 miliar dan alun-alun sebesar Rp280 miliar.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pihaknya menyerahkan hal ini kepada pemerintah. Sebab, pengeluaran anggaran pembangunan tersebut ada di tangan eksekutif karena parlemen di Indonesia tidak memiliki kewenangan independen dalam anggaran.

Hal itu pun terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengingatkan moratorium pembangunan gedung baru untuk instansi pemerintah belum lama ini. Padahal, kata Fahri, terkait anggaran dan pembangunan gedung DPR baru pada 2018 sudah disepakati di paripurna.

"Kami serahkan sepenuhnya ke eksekutif karena yang pegang uang sepenuhnya di eksekutif. Jadi terserah pemerintah walaupun kami sudah setujui di paripurna," katanya akhirp pekan lalu di kompleks parlemen.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menilai ide perbaikan kompleks parlemen adalah ide yang positif namun momentumnya kurang tepat. Menurut Idrus, wajar jika banyak yang tidak setuju dengan fasilitas baru itu karena saat ini kinerja dan produktifitas anggota parlemen tengah disoroti.

Di sisi lain, menurutnya, renovasi dan perbaikan kompleks parlemen harus dilakukan karena fasilitas yang ada saat ini sudah berumur puluhan tahun dan belum direnovasi. Sebagai gambaran, anggaran pembangunan gedung baru itu akan dibahas pada rencana tahun anggaran 2018.

"Perlu komitmen bahwa pembangunan ini diikuti oleh kinerja yang baik, diikuti oleh produktivitas," ujarnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan banyaknya penolakan atas pembangunan gedung baru itu tak terlepas dari kinerja DPR RI yang tak memuaskan.

"Pada dasarnya, mengalokasikan dana kepada DPR itu tidak ada masalah selama dibarengi dengan tingkat kepuasan publik terhadap mereka," ujarnya.

Dia menilai, kepuasan masyarakat terhadap DPR saat ini sangat rendah. Dia mencontohkan, saat terjadi penaikan anggaran untuk KPK atau TNI, masyarakat tidak banyak mengomentari hal itu. Sebab, kepuasan masyarakat tinggi terhadap kinerja lembaga tersebut dan permintaan kenaikan anggaran realistis.

Sebelumnya, anggaran DPR untuk 2018 mencapai Rp7,2 triliun. Namun, BURT DPR RI menyebut angka penaikan ditekan menjadi Rp5,7 triliun. Anggaran tersebut termasuk pembangunan gedung baru.

(Lingga S. Wiangga)